

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan

Anjar Mahmudin Nst¹, Helmiati², M. Nazir³

¹Mahasiswa S3 UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

^{2,3}Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

Email: anjarmahmudimmasution09@gmail.com, helmiati@uin-suska.ac.id, m.nazir@uin-suska.ac.id

Abstrak: Penerapan kebijakan Islam di Sudan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Pada masa pemerintahan Presiden Ja'far al-Nimeiry pada tahun 1983, kebijakan Islamisasi diperkenalkan secara tegas dengan diberlakukannya hukum syariat Islam di Sudan. Namun, kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Metode penelitian dalam penelitian kali ini yakni studi kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan data-data yang berasal dari buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis deskriptif. Hasil Penelitian adalah kompleksitas kebijakan Islam di Sudan menunjukkan bagaimana peran agama dapat menjadi kekuatan penyatu, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan dan ketidakstabilan sosial dan politik. Implikasi dari kebijakan ini terhadap stabilitas politik dan kesejahteraan sosial sangat signifikan, dengan ketegangan antara kelompok Muslim dan non-Muslim, tantangan dalam mengelola pluralisme agama, serta dampak ekonomi yang dihadapi oleh negara. Proses transisi Sudan menuju sistem yang lebih inklusif dan adil akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menyeimbangkan peran agama dalam kehidupan politik dengan kebutuhan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pendidikan Islam dan Sudan.

Abstract: The implementation of Islamic policies in Sudan is not free from various challenges, both internal and external. During the reign of President Ja'far al-Nimeiry in 1983, the policy of Islamisation was introduced explicitly with the enactment of Islamic sharia law in Sudan. However, however, this policy did not always run smoothly. The research method in this research is library research through the collection of data derived from the research through the collection of data derived from books and articles related to Policy Analysis. articles related to the Analysis of Islamic Education Policy in Sudan. Sudan. The method of analysis used is descriptive analysis. Research Result is the complexity of Islamic policy in Sudan shows how the role of religion can be a unifying force, but it can also exacerbate social and political tensions and instability. can exacerbate social and political tensions and instability. The implications of these policies on political stability and social welfare are very significant, with tensions between Muslim and non-Muslim groups, the challenges of in managing religious pluralism, as well as the economic impacts faced by the state. by the state. Sudan's transition process towards a more inclusive and just system will depend heavily on the state's ability to balance the role of religion in political life with the need to create a just, prosperous, and peaceful society.

Keywords: Analysis, Policy, Islamic Education and Sudan.

Pendahuluan

Sudan, sebagai negara yang terletak di kawasan Afrika Timur Laut, telah mengalami perubahan signifikan dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi sejak kemerdekaannya pada tahun 1956. Salah satu aspek penting dalam dinamika negara ini adalah penerapan kebijakan (G.R. Terry, 2000: 155) pendidikan Islam yang menjadi landasan utama dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan Pendidikan (H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 139) Islam di Sudan telah berkembang dalam berbagai bentuk dan mengalami perubahan yang mencerminkan dinamika politik dan tantangan sosial yang dihadapi negara ini. Sejak awal kemerdekaannya, Sudan sudah memiliki latar belakang Islam yang kuat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini mendorong munculnya kebijakan yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan negara, mulai dari sistem hukum, pendidikan, hingga ekonomi.

Penerapan kebijakan Islam di Sudan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Pada masa pemerintahan Presiden Ja'far al-Nimeiry pada



tahun 1983, kebijakan Islamisasi diperkenalkan secara tegas dengan diberlakukannya hukum syariat Islam di Sudan. Namun, kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa wilayah di Sudan, seperti wilayah selatan, yang memiliki populasi non-Muslim yang signifikan, merasa kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberagaman agama yang ada. Konflik yang berlarut-larut antara utara dan selatan, yang pada akhirnya berujung pada pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, menjadi bukti nyata dari ketegangan yang timbul akibat kebijakan Islam yang tidak dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Islam diterapkan di Sudan, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, makalah ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan Islam di Sudan berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti etnisitas, pluralisme agama, dan politik internasional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompleksitas kebijakan Islam di Sudan dan implikasinya terhadap stabilitas politik serta kesejahteraan sosial negara tersebut.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipergunakan peneliti yaitu studi kepustakaan (*library research*) (Dadang Kuswana, 2011: 37) dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada dipergustakaan, ditambah dengan artikel-artikel yang membahas tentang penelitian analisis kebijakan Pendidikan Islam di Sudan. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis deskriptif. (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996: 87) Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni analisis yang menjelaskan bahkan mengeksplorasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang diungkap. Noeng Muhadjir mengistilahkannya dengan *content analysis* (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005: 81-82) merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. *Content analysis* yakni upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi; menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi serta menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. (Noeng Muhadjir, 2000: 68).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Geografis Negara Sudan

Sudan adalah sebuah negara yang terletak di timur laut Afrika. Negara ini memiliki luas sekitar 1.886.068 km², menjadikannya negara terbesar ketiga di Afrika dan ke-16 di dunia. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai kondisi geografis Sudan: (www.wikipedia.com. "Sudan", diakses 20 Mei 2008.)

1) Letak Geografis

Sudan terletak di antara 8° hingga 23° Lintang Utara dan 22° hingga 38° Bujur Timur. Negara ini berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Merah dan Mesir; sebelah Timur Laut berbatasan dengan Eritrea; sebelah Timur berbatasan dengan Laut Merah; sebelah Selatan berbatasan dengan Negara Sudan Selatan; sebelah Barat berbatasan dengan Chad, Republik Afrika Tengah (Aucky Adi Kurniawan dan Muhammad Syaprin Zahidi, 2022: 8) serta sebelah Barat Laut berbatasan dengan Libya. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>)

2) Topografi

Sudan memiliki beragam bentuk permukaan tanah, yang terbagi menjadi beberapa zona:

- a. Pesisir Laut Merah: (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>) Di bagian timur, terdapat pesisir Laut Merah yang sempit. Di sepanjang pesisir ini terdapat dataran rendah dan pegunungan yang membentang.
- b. Dataran: Mayoritas wilayah Sudan adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan serta bukit-bukit. Dataran ini sebagian besar terletak di sepanjang sungai Nil, yang membelah Sudan dari Utara ke Selatan.
- c. Pegunungan: Pegunungan terletak di beberapa wilayah, seperti Pegunungan Nubia di bagian utara dan Pegunungan Marrah di barat daya.
- d. Padang Pasir Sahara: Di bagian utara Sudan, terletak di area gurun Sahara yang mencakup wilayah yang sangat kering. (<https://country-studies.com/sudan/geography.html>)

3) Sungai dan Danau

Sungai Nil, yang menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia, mengalir dari selatan ke utara melalui Sudan, membelah negara ini menjadi dua bagian. Sungai Nil dibagi menjadi dua cabang utama:

- a. Nil Putih: Mengalir dari Uganda melalui Sudan Selatan ke utara.
- b. Nil Biru: Mengalir dari Etiopia dan bertemu dengan Nil Putih di Khartoum, ibu kota Sudan. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>)

4) Iklim

Sudan memiliki iklim yang bervariasi, tergantung pada wilayahnya:

- a. Iklim Gurun: Di wilayah utara, yang termasuk dalam area gurun Sahara, cuaca sangat panas dan kering sepanjang tahun. Curah hujan sangat rendah, dan suhu bisa sangat ekstrem, terutama pada musim panas.
- b. Iklim Semi-Gurun dan Savana: Di bagian tengah dan selatan Sudan, curah hujan meningkat dan terdapat sabana dengan vegetasi semak dan pohon-pohon kecil.
- c. Iklim Tropis: Di wilayah selatan Sudan, terdapat iklim tropis dengan hujan musiman yang tinggi dan vegetasi yang lebih lebat.

5) Keanekaragaman Alam

Sudan memiliki berbagai ekosistem, dari padang pasir di utara hingga hutan tropis di selatan. Di sepanjang sungai Nil, tanahnya sangat subur, memungkinkan pertanian berkembang. Hutan-hutan di bagian selatan Sudan juga menyediakan berbagai sumber daya alam, meskipun banyak area ini masih kurang berkembang.

6) Sumber Daya Alam

Sudan kaya akan sumber daya alam, seperti:

- a. Minyak Bumi: Sebagian besar cadangan minyak Sudan terletak di wilayah selatan dan barat daya.
- b. Emas: Sudan adalah salah satu penghasil emas terbesar di Afrika.
- c. Bahan Galian Lain: Sudan juga memiliki cadangan besi, tembaga, dan batu bara.

7) Masalah Geografis

Beberapa tantangan geografis yang dihadapi Sudan meliputi:

- a. Degradasi Tanah: Proses erosi dan penggundulan hutan yang signifikan di beberapa bagian negara.
- b. Konflik Wilayah: Pembagian wilayah antara Sudan dan Sudan Selatan yang masih menyisakan masalah, terutama terkait dengan sumber daya alam.

Sudan terletak di Timur Laut Afrika. Sudan berasal dari ungkapan Arab *bilad al-sudan* (tanah orang kulit hitam), digunakan para ahli geografi Arab pada abad pertengahan dalam menyebut negara Afrika yang bermukim ditepi Selatan Sahara. Lebih dari satu abad lamanya, Sudan pertama kali sebagai wilayah jajahan, kemudian merdeka termasuk negara tetangganya Sudan Selatan. Kemudian Sudan Selatan memisahkan diri dari bagian Selatan tahun 2011. Sudan negara Afrika terbesar dengan memiliki luas lebih dari 8% benua Afrika dan hampir 2% dari total luas daratan dunia. ([https://www.britannica.com/place/Sudan/Plant-and-animal-life.](https://www.britannica.com/place/Sudan/Plant-and-animal-life))

Para ahli geografi Muslim abad pertengahan memberi nama Bilad al-Sudan, 'tanah orang kulit hitam', untuk sabuk wilayah Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Dalam arti yang lebih terbatas, wilayah yang terletak di selatan Mesir, yang membentuk Kondominium Anglo-Mesir dari tahun 1899 hingga 1955, dan yang sekarang membentuk Republik Sudan, istilah ini berasal dari abad kesembilan belas asal, sebutan administratif yang mudah digunakan untuk kekaisaran Afrika yang diperoleh oleh Muhammad 'Ali Pasha, raja muda Mesir, dan para penggantinya. Sudan dalam pengertian ini tidak termasuk wilayah luas di sebelah barat Darfur yang pada akhir abad ke-XIX dan awal abad ke-XX dibawah kekuasaan colonial Prancis dan Inggris.

Di sisi lain, ia juga mencakup wilayah-wilayah yang tidak menjadi bagian dari Sudan seperti yang dipahami secara tradisional - Nubia, tanah Beja dan pelabuhan-pelabuhan Utsmaniyah di pesisir Laut Merah. Secara tradisional, nama Nubia diterapkan pada seluruh wilayah aliran sungai dari Katarak Pertama hingga Ngarai Sabaluqa, tidak jauh di utara pertemuan Sungai Nil Biru dan Putih. Wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, yang memiliki sejarah yang terpisah dari awal abad ke-XVI hingga awal abad ke-XIX. Nubia Hilir, yang disebut oleh Ottoman Berberistan, 'tanah Barbara', membentang dari Katarak Pertama hingga Katarak Ketiga, dan dengan demikian mencakup wilayah di utara dan selatan perbatasan Mesir-Sudan modern. Setidaknya secara nominal, wilayah ini bergantung pada para viceroy Utsmaniyah di Mesir. Nubia Hulu, di atas Katarak Ketiga, berada di bawah kekuasaan penguasa Funj dari Sennar. (P.M. Holt dan M.W, Daly, 2011: 1)

Di sebelah Timur Nubia, di Perbukitan Laut Merah, terdapat suku Beja, yang dikenal oleh para Para penulis Muslim abad pertengahan sebagai kelompok etnis yang berbeda, bukan orang Nubia, bukan orang Arab, bukan pula orang Sudan ('orang kulit hitam'). Suakin dan pelabuhan kembarannya, Massawa (yang dianeksasi oleh Italia Massawa (yang dianeksasi oleh Italia pada tahun 1884) melihat ke Laut Merah dan Arab, bukan ke Lembah Sungai Nil, dari mana mereka dipisahkan oleh penghalang Bukit Laut Merah dan Beja yang keras kepala. (P.M. Holt dan M.W, Daly, 2011: 2)

Luas wilayah republik saat ini hampir mencapai satu juta mil persegi - sekitar seperempat luas Eropa. secara geografis, sebagian besar wilayah negara ini merupakan dataran yang luas. Wilayah ini dapat dibagi menjadi tiga zona: di bagian utara adalah gurun berbatu dan semi-gurun; di bagian selatan adalah sabuk pasir bergelombang, yang berpindah dari semi-gurun ke sabana; di bagian selatan lagi adalah sabuk tanah liat, yang melebar ke arah timur dari selatan Darfur ke lahan hujan dan semi-gurun yang terletak di sebelah timur Sungai Nil Biru dan Sungai Nil utama. Perbukitan Laut Merah, perpanjangan dataran tinggi Ethiopia di bagian utara, memisahkan dataran besar dari jalur pantai yang sempit. (P.M. Holt dan M.W, Daly, 2011: 2)

Dataran Sudan dikeringkan oleh Sungai Nil dan anak-anak sungainya. Baik Putih Putih dan Nil Biru mengalir ke luar negeri. Sungai Nil Putih memasuki Sudan (di mana hulunya dikenal sebagai Bahr al-Jabal, "Sungai Gunung") di Nimule, dan setelah

menempuh jarak seratus mil, masuk ke dataran tanah liat. Ini dia terhalang, dan meluas menjadi daerah rawa yang sangat luas, yang dikenal sebagai Sudd (bahasa Arab: sadd, “penghalang”). Setelah melalui jalur yang berliku sejauh empat ratus mil, sungai ini bergabung dengan anak sungai di sebelah baratnya, Bahr al-Ghazal, yang mengumpulkan air dari banyak sungai yang lebih kecil, mengeringkan dataran barat daya dan berasal di dataran tinggi batu besi yang membentuk pemisahan Sungai Nil-Kongo. Sekitar delapan puluh mil lebih jauh, sungai ini bergabung dengan Sobat dari timur. (P.M. Holt dan M.W, Daly, 2011: 2)

2. Ekonomi, Politik dan Budaya

Sudan, sebuah negara yang terletak di Afrika Utara dan Timur Laut, memiliki kondisi ekonomi, budaya, dan politik yang kompleks. Berikut adalah gambaran umum dari ketiga aspek tersebut:

1) Kondisi Ekonomi

Ekonomi Sudan menghadapi berbagai tantangan besar, terutama setelah terjadinya pemisahan Sudan Selatan pada 2011, yang mempengaruhi sektor minyak dan pendapatan negara. Sebelum pemisahan, Sudan Selatan menyumbang sebagian besar produksi minyak negara tersebut, sehingga kehilangan wilayah ini sangat mempengaruhi ekonomi Sudan yang kini bergantung pada sektor non-minyak, seperti pertanian, perdagangan, dan rempah-rempah. Tantangan utama ekonomi Sudan: (Ribut Nur Huda, 2022: 95)

- a. Hilangnya pendapatan minyak: Setelah pemisahan Sudan Selatan, Sudan kehilangan sekitar 75% dari sumber pendapatan minyaknya.
- b. Krisis inflasi: Inflasi yang sangat tinggi telah menggerogoti daya beli masyarakat, dan mata uang Sudan, pound Sudan (SDG), terus terdevaluasi.
- c. Utang luar negeri: Negara ini memiliki utang luar negeri yang besar dan belum dapat memulihkan aksesnya ke pasar keuangan internasional.
- d. Ketergantungan pada pertanian: Sudan memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi banyak potensi sektor pertanian yang belum dimaksimalkan dengan baik.
- e. Sanksi Internasional: Sanksi ekonomi internasional, yang diberlakukan oleh negara-negara Barat dan lembaga keuangan global, turut memperburuk kondisi ekonomi.

Meski demikian, pemerintah Sudan berusaha menarik investasi asing dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga dan internasional untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

2) Kondisi Budaya

Sudan adalah negara yang sangat beragam secara budaya dan etnis. Secara historis, Sudan memiliki warisan budaya yang kaya dengan pengaruh dari berbagai peradaban besar seperti Mesir Kuno, Nubia, dan Arab. Budaya Sudan dipengaruhi oleh Islam (sebagai agama mayoritas), (Aulia Candra Sari, 2017: 348) serta tradisi lokal dan etnisitas yang beragam. Aspek budaya utama di Sudan:

- a. Bahasa: Bahasa Arab adalah bahasa resmi, tetapi ada lebih dari 100 bahasa yang digunakan di berbagai suku dan kelompok etnis. Bahasa Inggris juga digunakan di beberapa konteks resmi.
- b. Agama: Mayoritas penduduk Sudan adalah Muslim Sunni, tetapi ada juga minoritas Kristen, terutama di wilayah selatan dan barat.
- c. Seni dan Musik: Sudan memiliki tradisi seni yang kaya, termasuk seni lukis, musik tradisional, dan tarian. Musik Sudan terkenal dengan genre seperti *niyala*, *al-tarab*, dan *al-azhar* yang menggabungkan melodi Arab dengan pengaruh lokal.

- d. Masakan: Makanan tradisional Sudan termasuk hidangan seperti *kisra* (roti tipis), *fuul* (kacang), dan *muhash* (daging dengan bumbu).
- e. Kehidupan Sosial: Kehidupan sosial Sudan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan tradisi lokal, dengan pentingnya keluarga besar dan komunitas dalam struktur sosial.

3) Kondisi Politik

Politik Sudan sangat dinamis dan penuh ketegangan. Sejak merdeka pada 1956, Sudan telah mengalami sejumlah konflik internal dan perubahan rezim. Pada 2019, Presiden Omar al-Bashir yang memerintah selama hampir tiga dekade digulingkan setelah protes massal terhadap pemerintahannya. Hal ini membuka jalan bagi perubahan politik, tetapi situasi tetap sangat tidak stabil. Poin-poin penting terkait politik Sudan:

- a. Revolusi dan Transisi: Setelah penggulingan Bashir, negara ini memasuki periode transisi dengan pemerintahan bersama antara militer dan sipil. Namun, ketegangan antara kedua pihak tetap ada.
- b. Konflik di Darfur dan Wilayah Lain: Sudan telah lama mengalami konflik di daerah-daerah seperti Darfur, Kordofan, dan Blue Nile. Konflik ini melibatkan kelompok pemberontak dan pasukan pemerintah, seringkali dengan keterlibatan kelompok etnis yang berbeda.
- c. Pemisahan Sudan Selatan: Pemisahan Sudan Selatan pada 2011 memicu berbagai ketegangan, terutama mengenai pembagian sumber daya alam dan pengungsi yang melintasi perbatasan.
- d. Peran Militer: Militer masih memainkan peran dominan dalam politik Sudan, bahkan setelah penggulingan Bashir. Militer dan kelompok paramiliter terlibat dalam pemerintahan transisi, dan peran mereka masih sangat besar dalam pengambilan keputusan negara.
- e. Perdamaian dan Isu Internasional: Beberapa perjanjian perdamaian telah dicapai dengan kelompok pemberontak, tetapi ketegangan politik dan kekerasan masih menjadi masalah besar.

Sudan menghadapi sejumlah tantangan besar, namun juga memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan budaya yang kaya. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, perdamaian internal, dan reformasi politik akan sangat menentukan masa depan negara ini.

3. Islam di Negara Sudan

Islam merupakan agama yang dominan di Sudan, dengan lebih dari 95% penduduknya beragama Islam. Sudan terletak di Timur Laut Afrika dan mayoritas penduduknya menganut Islam Sunni meskipun ada Sebagian kecil penganut Islam Syiah dan aliran-aliran lainnya.

Sejarah Islam di Sudan bermula pada abad ke-7, ketika Islam menyebar ke wilayah ini melalui kontak dengan pedagang dan penakluk Arab. Seiring waktu, Islam menjadi agama utama di Sudan, dan banyak budaya, tradisi, dan kebiasaan lokal menyatu dengan ajaran Islam. Selain itu, Sudan juga memiliki tradisi keislaman yang kuat, termasuk penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan.

Pada tahun 1983 hingga 2005, Sudan mengalami konflik besar antara pemerintah yang didominasi oleh kelompok Muslim Arab di utara dan kelompok yang lebih pluralis dan sebagian besar beragama Kristen di selatan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Sudan) Perang saudara ini berakhir dengan perjanjian damai yang mengarah pada pemisahan Sudan Selatan pada 2011, yang

sekarang merupakan negara merdeka. Meskipun demikian, Islam tetap menjadi agama negara yang dominan di Sudan.

Sistem hukum di Sudan, yang dikenal dengan nama "Hukum Syariah", diterapkan sebagian besar di wilayah utara dan di kalangan komunitas Muslim, meskipun pada beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk memperkenalkan sistem hukum yang lebih inklusif. Pada 2019, setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, Sudan mengalami perubahan besar, termasuk pencabutan beberapa kebijakan berbasis Syariah, seperti larangan alkohol dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan. Namun, meskipun ada perubahan politik dan sosial, Islam tetap memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Sudan.

Islam di Sudan sebagai agama mayoritas yang berpaham kepada Madzhab Maliki, (Ribut Nur Huda, 2022: 89) bahkan penganut tasawuf. (Nur Hasan) Perkembangan agama Islam di Sudan memiliki fase hingga akhirnya agama Islam sebagai agama mayoritas pada dinasti Funj. ([https://www.britannica.com/place/sudan/the-spread-of-Islam.](https://www.britannica.com/place/sudan/the-spread-of-Islam))

Dahulu Sudan masuk kekuasaan Turki Utsmani, (Nur Huda, 2022: 88) akan tetapi Islam berkembang ke berbagai penjuru daerah, bahkan berkembang kekuatan besar Turki Utsmani dalam menguasai negeri itu, hal ini dibuktikan dengan sebuah kerajaan besar Islam yaitu Funj. Funj menjadikan Kota Sinnar sebagai pusat kerajaan. Selanjutnya, timbul tarekat (sufi) yang memperoleh perhatian dari ulama dari Mesir, Afrika Utara bahkan Arab yang diperoleh kerajaan Funj ini. (Hasan, 2013: 1104) Islam mulai berkembang di masa Funj, hal ini dibuktikan dari masuknya Islam pada kalangan elit, komunitas perdagangan, bahkan adanya migrasi ulama serta orang suci ke daerah tersebut. Kemajuan yang dilakukan Funj akhirnya menarik perhatian para ulama dari Mesir, Afrika Utara dan Arab Saudi, kemudian memperoleh predikat keahlian di bidang al-Qur'an, Hukum Islam dan Tasawuf. (https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Sudan)

4. Sistem Pendidikan Islam di Negara Sudan

Gerakan Islam telah memberikan kontribusi besar untuk membangun peradaban Islam di Sudan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gerakan Islam memiliki alasan untuk memperkuat persatuan umat Islam dan untuk melaksanakan tugas memfasilitasi dukungan dan bantuan dari negara-negara Muslim yang diklasifikasikan 'lebih beruntung', kemudian disalurkan kepada negara-negara yang membutuhkan, meskipun meskipun semangat keilmuan yang dikembangkan lebih menekankan kebutuhan praktis lebih ditekankan daripada kebutuhan strategis. (Ribut Nur Huda, 2022: 94)

Nasib ulama lokal dan pendidikan tradisional, yang telah berkontribusi dalam mengikat sejarah Islam dan nasionalisme di Sudan melalui pendirian karya-karya seperti khalwah masiid, dan ma'had, adalah satu hal krusial yang terpisah dari utama Gerakan Islam terlepas dari manfaat dan warisan yang mereka tinggalkan. dan warisan yang mereka tinggalkan. Di Sudan, lembaga-lembaga formal formal tidak memiliki identitas sosial-keagamaan seperti yang dimiliki oleh pendidikan tradisional ini. Hal ini tercermin dalam produk pendidikan tradisional seperti para pejuang kemerdekaan termasuk Zaim al-Azhari yang terpilih menjadi anggota Delegasi Mesir untuk menghadiri Konferensi Asia Konferensi Asia Afrika di Bandung pada saat itu. (Ribut Nur Huda, 2022: 95)

Perkembangan selanjutnya termasuk munculnya ilmuwan-ilmuwan terkenal yang pengaruhnya terhadap literasi meluas ke tingkat regional dan bahkan global regional. Namun, sistem akademik menderita ketika Sudan diperintah oleh Gerakan Islam karena tidak mendapatkan banyak dukungan pemerintah. Sejak itu, banyak

ilmuwan meninggalkan Sudan, berkarier di luar negeri, dan hanya bersedia kembali ke tanah air mereka ketika mereka pensiun atau setelah ada permintaan dan tekanan dari gerakan Islam. Gerakan Islam. (Ribut Nur Huda, 2022: 95)

1. Pendidikan Dasar.

Pendidikan dasar yakni wajib belajar delapan tahun yang berujung pada ijazah pendidikan dasar. (<https://www-scholaro-com.translate.goog/db/Countries/sudan/Education-System>)

2. Pendidikan menengah.

Tiga tahun pendidikan menengah yang mengarah ke Sertifikat Sekolah Menengah Atas Sudan. Sekolah menengah teknik juga tersedia. Pendidikan pasca-sekolah menengah

3. Pendidikan tinggi tersedia melalui universitas swasta dan negeri serta sekolah tinggi teknik.

Sistem penilaian. Kemitraan Global untuk Pendidikan GPE (*The Global Partnership for Education*) telah mendukung pengembangan sistem penilaian, termasuk: Database manajemen guru yang mencakup data tentang kualifikasi, pengalaman, dan nilai karir guru. Penilaian pembelajaran nasional untuk pembelajaran kelas awal. Sensus sekolah tahunan/survei cepat yang mengumpulkan data tentang jenis sekolah, lokasi, pendaftaran siswa, dan lainnya. (<https://www.globalpartnership.org/results/country-journeys/sudan-building-foundation-strong-education-system#>)

Pendidikan formal di Sudan dibebaskan atau digratiskan (Kholid Junaidi, et.al., 2022: 104) bahkan diwajibkan bagi seluruh anak-anak yang usia 6-13 tahun. (https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Sudan) Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar selama dari delapan tahun, kemudian pendidikan menengah tiga tahun. Jenjang pendidikan diubah menjadi berformat 6 + 3 + 3 tahun diubah pada tahun 1965 dan selama masa kepresidenan Omar al-Bashir menjadi 8+3 dan dijadwalkan, selama transisi Sudan menuju demokrasi 2019, untuk kembali ke 6+3+3 pada tahun ajaran 2020/2021. Bahasa utama di semua tingkatan adalah bahasa Arab. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>) Mulai tahun ajaran 2020/2021, bahasa Inggris akan diajarkan mulai dari taman kanak-kanak. Sekolah-sekolah terkonsentrasi di daerah perkotaan; banyak sekolah di Selatan dan Barat yang rusak atau hancur akibat perang saudara selama bertahun-tahun. Pada tahun 2001, Bank Dunia memperkirakan bahwa pendaftaran sekolah dasar adalah 46 persen dari siswa yang memenuhi syarat dan 21 persen dari siswa sekolah menengah. Angka pendaftaran sangat bervariasi, bahkan di beberapa provinsi angkanya di bawah 20 persen. Sudan memiliki 36 universitas negeri dan 19 universitas swasta, yang pengajarannya sebagian besar menggunakan bahasa Arab.

Adapun pendidikan non formal, terdapat banyak majelis-majelis ilmu yang menggunakan sistem *talaqqi* lewat para *masyaikh* yang tersebar hampir di seluruh penjuru Sudan. Jamaah yang paling eksis dalam model pendidikan ini adalah Jamaah Anshar Sunnah al-Muhammadiyah yang mengajarkan faham *ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Materi yang diajarkan dalam majelis-majelis ilmu tersebut antara lain: tauhid, tafsir, hadits, fiqh, dan sejarah. (Binti Maunah, 2011)

Sistem pendidikan Islam di Sudan memiliki struktur yang mencakup berbagai tingkat dan jenis lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, yang berfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama Islam. Sistem ini terintegrasi

dengan pendidikan umum dan juga memiliki lembaga-lembaga pendidikan khusus agama yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sudan.

Pada tahun 2001, Bank Dunia memperkirakan bahwa partisipasi murni siswa Sekolah Dasar adalah 46% dan 21 persen dari pelajar sekolah menengah yang terdiri dari siswa yang memenuhi syarat. Tingkat kelangsungan pendidikan di Sudan sangat bervariasi, di beberapa provinsi bahkan hanya mencapai di bawah 20%. Walaupun Sudan memiliki 19 universitas berbahasa Arab, pendidikan di tingkat menengah dan pendidikan tinggi di universitas mengalami masalah penghambat yang serius disebabkan oleh sebagian besar penduduk berjenis kelamin laki-laki melaksanakan dinas militer sebelum dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Menurut perkiraan Bank Dunia, pada tahun 2000 tingkat baca-tulis pada orang dewasa berusia 15 tahun keatas hampir 58% (69% untuk laki-laki, 46 % untuk wanita). Sedangkan pada tahun 2002, tingkat baca-tulis pada orang dewasa berusia 15 tahun keatas mencapai 60% dan tingkat buta aksara pemuda (usia 15-24) diperkirakan sebesar 23%

Pemerintah Sudan Selatan mengatur sistem pendidikan selama perang, yang berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai di tahun 2005, (Jacques Kubranz Buhendwa and Kenneth Adam Masungu, 2018) dari sini memulai kebijakan Pendidikan, memperkuat administrasi Pendidikan, membuat kurikulum praktis, melatih guru yang tujuannya untuk memastikan masa depan pembelajaran bagi semua. Akan tetapi, ketika sedang mencari Solusi dalam mengatasi masalah-masalah krusial, terjadi pemberontakan dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan wakil presiden di tahun 2013, sehingga merusak rencana pendidikan internasional yang digagas EFA. (Jacques Kubranz Buhendwa and Kenneth Adam Masungu, 2018)

Negara Sudan melahirkan majelis ilmiah dengan sistem *talaqqi* melalui *masyakh* yang telah menyebar ke seluruh pelosok Sudan, sehingga terlihat stabilitas politik yang baik, maka Sudan dan Mesir memiliki pendidikan yang maju. Politik Mesir dan Sudan masih baik, maka al-Azhar bertahan karena memiliki akar pendidikan yang kuat. Tahun 1990 di mana Tingkat Pendidikan dirubah menjadi format 6 + 3 + 3. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar yang digunakan di semua tingkatan. Lokasi sekolah terkonsentrasi di sejumlah wilayah perkotaan, untuk sejumlah sekolah yang berada di Selatan dan Barat telah rusak dan bahkan hancur diakibatkan oleh konflik di tanah air Sudan sendiri.

Tiga perempat dan dua pertiga dari sekolah dasar di daerah pedesaan dan perkotaan masing-masing memiliki prasekolah prasekolah yang melekat pada mereka. Secara keseluruhan, sekitar 72% sekolah dasar memiliki prasekolah yang terhubung dengan sekolah tersebut.

Diperkirakan bahwa GER pra-sekolah meningkat 6 poin persentase dari 37,1% pada tahun 2009 menjadi 42,8% pada tahun 2016. pada tahun 2016, yang tidak berarti mengingat tingkat perkembangan PAUD di beberapa negara tetangga yang memiliki perekonomian yang lebih besar. Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar tetap stabil di angka 72 antara tahun 2009 dan 2016 sebelum meningkat satu poin menjadi 73% pada tahun 2017. Di sekolah menengah, GER meningkat 5 poin persentase dari 34% pada tahun 2009 menjadi 39% pada tahun 2016 sebelum turun satu poin pada tahun 2017 menjadi 38%. 2017 menjadi 38%. Terdapat lebih banyak anak laki-laki yang mengakses sekolah dasar dibandingkan dengan anak perempuan, yang mencatatkan GER sebesar 75% sementara yang terakhir mencatatkan 71%. Di sebagian besar negara bagian, kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan sangat kecil, tetapi dalam beberapa kasus, kesenjangannya sangat besar. Di sekolah menengah,

anak perempuan memiliki cakupan 41% dibandingkan dengan 35% untuk anak laki-laki, pola ini terlihat jelas di semua negara bagian kecuali Darfur Tengah, Kordofan Barat, Al Gadarif, dan Darfur Barat di mana anak laki-laki memiliki GER yang sedikit lebih tinggi.

Meskipun saat ini lebih banyak anak yang mengakses sekolah dibandingkan tahun 2009, sistem diperlambat oleh tingginya angka putus sekolah sehingga pencapaian pendidikan dasar universal menjadi tantangan besar besar bagi Sudan. Tingkat retensi turun dari 67% pada tahun 2009 menjadi 62% pada tahun 2017. Ada kesenjangan yang cukup besar kesenjangan yang cukup besar antara lokasi pedesaan dan perkotaan, GIR untuk sekolah perkotaan adalah 91%, 9 poin persentase lebih tinggi dari rata-rata, sementara di sekolah-sekolah pedesaan, GIR adalah 78%. Retensi juga lebih baik di sekolah-sekolah perkotaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pedesaan. Pada akhir pendidikan dasar, Angka Kelulusan untuk sekolah-sekolah di perkotaan 77%, lebih dari dua kali lipat tingkat kelulusan di sekolah pedesaan (38%), yang berarti tingkat retensi sebesar 85% dan 49% untuk sekolah perkotaan dan pedesaan.

Meskipun terdapat keterlambatan dalam memasuki pendidikan dasar di negara ini, terdapat peningkatan yang cukup besar antara tahun 2009 dan 2014. Pada tahun 2009, 40% anak usia 6 tahun dilaporkan telah bersekolah dibandingkan dengan 7 dari 10 anak pada tahun 2014 - peningkatan sebesar 30 persen hanya dalam waktu lima tahun. Meskipun terjadi peningkatan, hampir 3 juta anak usia sekolah masih belum bersekolah. 2,86 juta anak yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah tidak bersekolah, sebagian besar dari mereka berada dalam rentang usia referensi pendidikan dasar. Data dari survei yang dilakukan di 6 negara bagian dengan konsentrasi pengungsi yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak yang terdaftar di sekolah-sekolah di sekitarnya adalah penduduk asli. Dalam pendidikan dasar, jumlah pengungsi yang terdaftar di sekolah-sekolah ini mencapai 5% dari total pendaftaran, yang menandakan perlunya kepada warga negara asing yang diberikan status pengungsi dan suaka di negara ini.

Total belanja pendidikan meningkat 154% dari Rp 2,7 triliun di tahun 2009 menjadi Rp 6,9 triliun di tahun 2017. pada tahun 2017. Pengeluaran berulang di bidang pendidikan dalam harga saat ini meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama meningkat dari SDG 2,4 triliun pada tahun 2009 menjadi SDG 5,4 triliun pada tahun 2017. Akan tetapi, hal ini Namun, terlihat bahwa dalam harga konstan 2016, belanja rutin pendidikan turun setengahnya pada periode yang sama yang sama, negara telah menghabiskan setara dengan SDG 10,5 triliun pada tahun 2009 dibandingkan dengan SDG 5,4 triliun pada tahun 2017. triliun pada tahun 2017.

Pendidikan dasar adalah satu-satunya pembelanja terbesar dari anggaran rutin - 46% dari anggaran rutin dihabiskan untuk pendidikan dasar. Pendidikan tinggi dan menengah masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga dengan total pengeluaran sebesar SDG 1.159 juta dan SDG 963 juta, yang pertama berarti 20% dari total dari total pengeluaran rutin pemerintah untuk pendidikan, sementara yang terakhir mencapai 17%. Secara keseluruhan pengeluaran untuk pendidikan umum (PAUD, pendidikan dasar dan menengah) merupakan 67% dari total pengeluaran rutin pemerintah untuk pendidikan.

Terdapat 217.000 guru di sekolah pendidikan dasar, 175.000 di sekolah-sekolah Pemerintah dan 42.300 di sekolah-sekolah non-pemerintah. Sekitar 24.000 guru di sekolah pendidikan dasar Pemerintah merupakan guru sukarelawan, yang berarti 13%

dari total guru di sekolah-sekolah Pemerintah. Di sekolah menengah sekolah menengah, hampir 8.000 guru dari total 78.549 guru adalah sukarelawan yang mewakili 11%. Rasio Murid Guru di pendidikan dasar adalah 1:36 dengan kesenjangan yang cukup besar antar negara bagian mulai dari yang tertinggi 1:63 di negara bagian Darfur Barat hingga yang terendah 1:17 di negara bagian Utara.

Penilaian Pembelajaran Nasional yang dilakukan pada tahun 2014 menetapkan bahwa 40% peserta didik di kelas 3 di Sudan tidak dapat membaca kata-kata yang sudah dikenal dibandingkan dengan rata-rata 20% dari negara-negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam hal kefasihan membaca lisan, diukur dari jumlah kata yang benar yang dibaca per menit oleh para siswa, penilaian menetapkan rata-rata 14 kata per menit. Di bidang Matematika, hampir tiga perempat dari siswa kelas tiga tidak memiliki masalah dalam mengidentifikasi angka dan bentuk, dan sekitar dua pertiganya dapat membedakan jumlah. Dalam hal aplikasi, meskipun dua pertiga siswa dapat mengidentifikasi angka dengan benar, kurang dari setengahnya (46%) (46%) mengerjakan soal penjumlahan level 1 dengan benar dan bahkan lebih sedikit lagi (39,9%) yang dapat mengerjakan soal penjumlahan level 2.

Pendidikan Islam di Sudan dibagi ke dalam beberapa tingkatan yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Berikut adalah rincian sistem pendidikan Islam di Sudan:

a. Pendidikan Dasar (Madrasah)

Pada tingkat dasar, anak-anak di Sudan mulai belajar pendidikan agama Islam sejak usia dini. Pendidikan agama diajarkan di **madrasah** atau sekolah agama yang berfokus pada pengajaran al-Qur'an, tajwid (ilmu membaca al-Qur'an dengan benar), fiqh, dan aqidah. Di madrasah ini, selain mempelajari mata pelajaran agama, anak-anak juga diajarkan mata pelajaran umum seperti bahasa Arab, matematika, dan ilmu pengetahuan dasar. Pelajaran Agama: Pada tingkat ini, pelajaran agama sangat ditekankan, termasuk mempelajari al-Qur'an, hadits, fiqh dasar, serta etika dan moralitas dalam Islam. Integrasi dengan Pendidikan Umum: Selain pembelajaran agama, madrasah juga seringkali mengajarkan mata pelajaran umum seperti bahasa Arab, matematika, dan pelajaran dasar lainnya.

b. Pendidikan Menengah (Sekolah Agama dan Sekolah Umum)

Setelah pendidikan dasar, siswa dapat melanjutkan ke tingkat menengah di sekolah-sekolah agama atau sekolah umum yang memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya. Di tingkat menengah, ada dua jalur utama pendidikan: Sekolah Agama (Madrasah Menengah): Di sini, pendidikan agama Islam lebih mendalam, termasuk studi tentang tafsir (penafsiran Al-Qur'an), hadits, fiqh, serta sejarah Islam. Beberapa madrasah menengah menawarkan kurikulum yang mirip dengan sekolah-sekolah agama di negara-negara Arab lainnya. Sekolah Umum dengan Pendidikan Agama: Banyak sekolah umum di Sudan yang juga mengajarkan pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran utama, meskipun tidak seintensif di madrasah. Di sekolah umum, pelajaran agama sering kali terintegrasi dalam kurikulum nasional.

c. Pendidikan Tinggi (Universitas Islam dan Fakultas Agama)

Sudan memiliki sejumlah universitas yang menawarkan program pendidikan tinggi di bidang agama Islam. Pendidikan tinggi ini sangat penting bagi mereka yang ingin mengembangkan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu Islam, seperti fiqh, tafsir, hadits, aqidah, dan sejarah Islam. Beberapa universitas Islam yang terkenal di Sudan antara lain: Universitas Islam Sudan: Menyediakan berbagai program studi terkait ilmu agama Islam dan bidang lainnya, termasuk teologi, hukum Islam (fiqh),

pendidikan Islam, dan dakwah. Universitas Al-Azhar Sudan: Merupakan cabang dari Universitas Al-Azhar di Mesir, yang menawarkan program-program pendidikan Islam dalam berbagai disiplin ilmu, seperti fiqh, tafsir, dan hadits.

Di tingkat perguruan tinggi ini, mahasiswa dapat mengikuti program sarjana, magister, dan doktoral yang berfokus pada studi Islam dalam berbagai perspektif.

d. Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam di Sudan sangat terfokus pada pengajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan ajaran Islam. Kurikulum ini mencakup beberapa komponen utama: Al-Qur'an dan Tafsir: Di semua tingkatan pendidikan, mempelajari Al-Qur'an adalah hal yang sangat penting. Anak-anak mulai diajarkan membaca dan menghafal Al-Qur'an, dan mereka juga mempelajari tafsir untuk memahami makna ayat-ayatnya. Fiqh (Ilmu Hukum Islam): Ilmu fiqh mengajarkan siswa tentang hukum-hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, keluarga, ekonomi, hingga sistem sosial dan politik. Aqidah (Teologi Islam): Siswa diajarkan mengenai dasar-dasar keyakinan dalam Islam, termasuk iman kepada Allah, rasul-Nya, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan hari kiamat. Hadits: Hadits adalah koleksi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Studi hadits membantu siswa memahami sunnah Nabi dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah Islam: Sejarah Islam juga menjadi bagian penting dari kurikulum, yang mengajarkan tentang perjalanan sejarah Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga perkembangan Islam di dunia dan khususnya di Sudan.

Jumlah kandidat yang mengikuti ujian di tingkat dasar dan menengah telah meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat kelulusan masing-masing 78% dan 70% untuk ujian akhir sekolah dasar dan akhir sekolah menengah masing-masing untuk ujian akhir tingkat dasar dan menengah.

No.	Pendidikan	Sekolah/ Tingkat	Nilai	Usia	Bertahun	Keterangan
1	Utama	Pendidikan Dasar	1-8	6-13	8	6+3+3
2	Sekunder	Sekunder		14-17	3	
3	Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan			3	
4	Tersier	Sarjana			4-6	
5	Tersier	Menguasai			2-3	
6	Tersier	Gelar Doktor			3	

(<https://www.scholaro.com/db/Countries/sudan/Education-System>)

5. Kerangka Kebijakan Pendidikan di Sudan

Pengembangan pendidikan di Sudan tertuang dalam hukum tertinggi negara dengan yang jelas untuk memfasilitasi investasi sumber daya manusia di semua tingkat pendidikan dan pelatihan. Konstitusi Sementara tahun 2005, dalam Bab 2 dan Pasal 13 memberikan kerangka kerja yang komprehensif yang komprehensif untuk pengembangan pendidikan. Dalam pendidikan umum, tanggung jawab manajemen pendidikan di Sudan dibagi antara tingkat pemerintahan federal, negara bagian dan lokal. Pemerintah federal federal melalui Kementerian Pendidikan Federal bertanggung jawab atas pengawasan di sektor dan untuk pengembangan dan pemeliharaan standar termasuk pengembangan kurikulum dan mobilisasi sumber daya dari sumber internal dan eksternal. Di tingkat negara bagian, dewan pendidikan mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, sejajar dengan dewan pendidikan nasional. Di

kedua tingkat pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan kontribusi pada penyediaan pendidikan bersama Pemerintah.

Pemerintah Sudan berkomitmen untuk memberikan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan Konstitusi Sementara 2005; komitmen dan konvensi internasional yang mengupayakan pengembangan pendidikan. Komitmen tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam visi Kementerian Pendidikan Federal yaitu menjadi sistem pendidikan yang unggul dalam hal nilai dan dalam hal nilai-nilai dan ilmu pengetahuan. Seiring dengan pemulihan dari dampak konflik sipil yang melanda selama lebih dari dua dekade, Pemerintah mengakui peran yang dimainkan oleh pendidikan dalam mengentaskan rakyatnya dari buta huruf dan kemiskinan serta memberikan harapan bagi bangsa yang lebih damai dan kohesif. Kementerian Pendidikan Federal dan Negara Bagian Kementerian Pendidikan Federal dan Negara Bagian terus memberikan kepemimpinan yang penting mengembangkan program pendidikan yang akomodatif tidak hanya untuk warga negara Sudan tetapi juga warga negara asing yang mencari perlindungan di Sudan. (Republic of Sudan, 2023)

Rencana Dukungan Sektor Pendidikan 2018/19-2022/23 telah dikembangkan dengan latar belakang Strategi Pembangunan Nasional dan memberikan kerangka kerja untuk investasi dalam Pendidikan Umum di Sudan antara 2018/29 dan 2022/23. Rencana tersebut telah dikembangkan melalui tinjauan komprehensif terhadap Pendidikan Umum yang mencakup kapasitas kelembagaan untuk mengakomodasi jumlah anak usia sekolah yang terus bertambah; tinjauan sumber daya yang diarahkan ke sektor ini dan kontribusi dari rumah tangga; dan hasil pembelajaran di kelas target serta akhir pendidikan dasar dan menengah. Tinjauan ini tidak hanya memberikan status pendidikan di tingkat federal tetapi juga di tingkat negara bagian sehingga memberikan kesempatan untuk memahami masalah dan kendala dari berbagai perspektif. Dengan demikian, rencana tersebut memiliki dasar yang kuat untuk membangunnya. Rencana ini telah dikembangkan melalui proses konsultatif yang melibatkan partisipasi dari Kementerian Pendidikan Federal; Kementerian Pendidikan Negara Bagian; Direktur Perencanaan Negara Bagian; dan mitra pembangunan lokal dan internasional. Masalah dan kendala yang diidentifikasi dalam rencana tersebut diakui bersama sebagai tantangan yang valid dari sektor pendidikan di Sudan. Usulan-usulan yang terkandung dalam rencana rencana untuk implementasi dalam periode rencana sektor yang akan datang telah menerima dukungan penuh dari para pemangku kepentingan pemangku kepentingan di sektor ini dan hal ini akan sangat penting untuk kelancaran dan efisiensi pelaksanaan rencana tersebut.

Komunitas Muslim Sudan buta huruf dan menekan subjek pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya. Masyarakat Muslim Sudan buta huruf dan tertekan oleh pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya, karena dua faktor: Islam mendorong Pertama, Islam mendorong pencarian pengetahuan dan pendidikan, yang dianggap sebagai kebajikan besar bagi seorang pria Muslim dan statusnya di dunia dan akhirat. Raed Sanu Badeed al-Douri Darya Mohammed Aziz al-Dawoodi, 2018)

Secara umum, kuliah di Sudan telah deprogram, artinya perguruan tinggi di Sudan telah memiliki komitmen dalam meningkatkan pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan Konstitusi Sementara 2005; komitmen dan konvensi internasional internasional yang mengupayakan pengembangan pendidikan. Komitmen tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam visi Kementerian Pendidikan Federal yaitu menjadi sistem pendidikan yang unggul dalam hal nilai dan dalam hal

nilai-nilai dan ilmu pengetahuan. Seiring dengan pemulihan dari dampak konflik sipil yang melanda selama lebih dari dua dekade, Pemerintah mengakui peran yang dimainkan oleh pendidikan dalam mengentaskan rakyatnya dari buta huruf dan kemiskinan serta memberikan harapan bagi bangsa yang lebih damai dan kohesif. Kementerian Pendidikan Federal dan Negara Bagian Kementerian Pendidikan Federal dan Negara Bagian terus memberikan kepemimpinan yang penting mengembangkan program pendidikan yang akomodatif tidak hanya untuk warga negara Sudan tetapi juga warga negara asing yang mencari perlindungan di Sudan.

Sebelum era Omar al-Bashir, pendidikan Sudan masih dianggap sebagai yang terbaik di negara-negara Arab. Meskipun Sudan merupakan salah satu negara dengan tingkat pembangunan manusia yang masih rendah (*low development index countries*), namun Sudan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Afrika lainnya, terutama di bidang pendidikan, yang meningkatkan tingkat melek huruf di negara tersebut hingga mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 71,9%, yang relatif tinggi di antara negara-negara dengan indeks pembangunan yang rendah. (Ribut Nur Huda, 2022)

Di bawah kepemimpinan Jaafar Nimeiry, Sudan menghasilkan akademisi yang kemampuannya tak terbantahkan karena mereka mengirimkan para sarjana dan mengundang para ahli dari luar negeri. Para ulama Sudan telah menerima banyak pengakuan dari luar negeri seperti Syaikh Mohamed al-Mubarak Abdullah dari Daggola yang belajar di Universitas al-Azhar, Mesir dan mengajar pada semua tingkatan selama 11 tahun serta menghasilkan ulama-ulama semisal Syaikh Mutwalli al-Sya'rawi, Syaikh Athiyah Saqar, Ali Muhammad Hasan al-Umari, Syaikh Kamil al-Sayed Syahin, yang Kembali mengajar di tanah airnya bahkan menjadi rektor Universitas Islam Omdurman tahun 1972. Pesannya yang populer dapat diterjemahkan menjadi: siapa pun yang ingin menyampaikan pengetahuan tentang sosial-keagamaan pendidikan sosial-keagamaan kepada masyarakat umum tidak boleh berafiliasi atau anggota partai politik atau kelompok etnis tertentu sehingga sebanyak mungkin orang dapat memahami pesannya, dan dapat didengar oleh semua orang dengan berbagai latar belakangnya. (Ribut Nur Huda, 2022)

Tradisi keilmuan di Sudan pasca-kemerdekaan cukup dinamis. Sebelum akhir abad ke-20, Sudan selain mengirimkan para sarjana, juga mendatangkan para ahli dari luar negeri seperti para ilmuwan dan intelegen dari Mesir seperti Abdul Mun'im al-Qi'i, Tamam Hasan, Aisyah Abderrahman binti Syathi dan dari negara-negara Timur Tengah lainnya. Timur Tengah lainnya dan bahkan dari Barat. Sudan dikenal oleh dunia, terutama di kalangan Arab melalui tokoh legendaris Adallah Thayib. Karyanya yang berjudul *al-Mursyid Ilaa Fahmi Asy'aril Arab* mendapat apresiasi dari tokoh-tokoh besar pada masanya termasuk Dr. besar pada masanya termasuk Thaha Husein, Mesir. Buku ini akan akan terus memotivasi para pembaca dan menjadi sumber utama penelitian untuk Fakultas Adab di Universitas Al-Azhar pada tahun 2022, yang mendukung upaya untuk mendekatkan Kitab Kuning atau Taqribut Turost. (Ribut Nur Huda, 2022)

6. Lembaga Pendidikan Islam di Negara Sudan

Lembaga pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Beberapa lembaga pendidikan agama yang terkenal di Sudan antara lain:

Universitas Al-Azhar di Sudan: Meskipun Universitas al-Azhar berasal dari Mesir, kampus cabangnya di Sudan sangat terkenal dan menjadi pusat studi Islam di kawasan tersebut. Universitas ini dikenal dengan kurikulum yang mengajarkan berbagai

disiplin ilmu agama, termasuk fiqh, tafsir, hadis, dan teologi. (Higher Education Admission Committee, 1991)

Universitas Islam Sudan (*University of Sudan for Science and Technology*): Lembaga ini merupakan universitas terkemuka yang menawarkan program pendidikan di bidang ilmu agama, termasuk studi Islam, hukum syariah, dan ilmu sosial Islam.

Lembaga Pendidikan Agama di Madrasah: Di Sudan, madrasah merupakan bagian penting dari pendidikan agama. Madrasah ini mengajarkan pelajaran agama dasar, seperti al-Qur'an, fiqh, dan akhlak kepada siswa dari berbagai usia. Banyak anak-anak di Sudan yang belajar di madrasah untuk memperoleh pendidikan agama Islam yang lebih mendalam.

Institut al-Qur'an: Sudan memiliki banyak lembaga yang secara khusus berfokus pada pengajaran al-Qur'an, baik dalam bentuk hafalan maupun tafsir. Lembaga ini sering kali berperan dalam pembinaan generasi muda yang ingin menghafal dan memahami isi al-Qur'an dengan lebih baik.

Lembaga Pengajaran Syariah: Banyak lembaga di Sudan yang menawarkan pendidikan khusus dalam ilmu hukum Islam atau syariah. Pendidikan ini meliputi pemahaman tentang hukum keluarga Islam, hukum pidana Islam, dan berbagai aspek lainnya dari syariah.

Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendidik generasi muda Sudan, memelihara tradisi Islam yang kuat, dan memastikan keberlanjutan pemahaman agama Islam yang mendalam dalam masyarakat Sudan. (Khartoum International Institute for Arabic Language, 1982)

7. Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam di Negara Sudan

Analisis kebijakan pendidikan pada Lembaga pendidikan Islam di Sudan dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi negara. Secara umum, pembiayaan pendidikan di lembaga-lembaga ini melibatkan beberapa sumber utama, termasuk dukungan pemerintah, sumbangan pribadi, dan organisasi non-pemerintah. (Monira Hamid et.al., 2021) Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada Lembaga pendidikan Islam di Sudan:

1) Pembiayaan Pemerintah

Pemerintah Sudan memiliki peran penting dalam menyediakan dana untuk lembaga pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain:

Subsidi Pemerintah: Pemerintah Sudan menyediakan dana subsidi untuk sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan Islam, baik itu sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pendanaan untuk Madrasah dan Sekolah Islam: Madrasah dan sekolah Islam mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mendukung operasional mereka. Namun, dana yang diberikan seringkali terbatas, dan banyak lembaga pendidikan Islam harus mencari sumber pendanaan lain untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengajaran mereka.

2) Sumber Pembiayaan Swasta dan Sumbangan Masyarakat

Selain dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan Islam di Sudan juga sangat bergantung pada sumber dana dari sektor swasta dan masyarakat, seperti:

Donasi Pribadi: Banyak lembaga pendidikan Islam di Sudan, terutama madrasah dan institusi kecil, mengandalkan sumbangan dari masyarakat setempat, baik

berupa dana atau bahan ajar. Masyarakat seringkali berperan aktif dalam mendukung pembiayaan pendidikan agama, baik secara finansial maupun dalam bentuk layanan sukarela.

Organisasi Non-Pemerintah (LSM): Beberapa organisasi internasional dan LSM lokal juga berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan Islam di Sudan. Lembaga-lembaga ini sering memberikan dana untuk proyek-proyek pengajaran Al-Qur'an, pelatihan guru agama, atau pembangunan fasilitas pendidikan.

3) Pembiayaan melalui Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting dalam pendidikan Islam di Sudan. Banyak lembaga pendidikan Islam, termasuk universitas dan madrasah, didanai melalui wakaf berupa tanah, bangunan, atau dana tunai yang dikelola oleh lembaga keagamaan. Wakaf ini digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, dan memperbaiki fasilitas pendidikan. (Umi Zulfa, 2012)

4) Beasiswa dan Program Pendanaan Khusus

Beberapa lembaga pendidikan Islam, terutama universitas dan institusi besar, menyediakan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. Beasiswa ini dapat berasal dari pemerintah, organisasi internasional, atau sumber swasta. (<https://www.globalpartnership.org>) Program pendanaan khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

5) Keterbatasan Pembiayaan

Meskipun ada berbagai sumber pembiayaan, banyak lembaga pendidikan Islam di Sudan yang menghadapi tantangan dalam hal pendanaan. Krisis ekonomi, konflik politik, dan ketegangan sosial seringkali mengurangi kapasitas pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan. Hal ini menyebabkan banyak lembaga pendidikan Islam, terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti fasilitas, gaji pengajar, dan bahan ajar. (Khartoum, 2018)

Secara umum, kebijakan pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam di Sudan merupakan kombinasi antara dukungan pemerintah, kontribusi masyarakat, serta sumber pembiayaan swasta dan wakaf. Namun, ketergantungan pada sumber dana eksternal seringkali menambah tantangan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan Islam di negara ini.

Negara ini menghadapi krisis politik dan kemerosotan ekonomi yang telah melumpuhkan keuangan pendidikan, ketidakstabilan guru dan terbatasnya akses pendidikan serta anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus yang terabaikan. Permintaan akan program pendidikan sangat besar di 18 negara bagian Sudan karena kurangnya strategi pembangunan dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan nasional yang sebelumnya menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan di Sudan selatan, barat dan timur. Masyarakat sipil adalah batu penjurus untuk mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk pendidikan, namun diperlukan lebih banyak lobi dan advokasi untuk menyusun strategi peran mereka.

Proyek ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan di Sudan yang mengalami kemerosotan besar yang menyebabkan beberapa hasil negatif, misalnya angka putus sekolah yang tinggi, migrasi guru ke Teluk, orang tua yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah swasta yang tidak terjangkau oleh semua orang, kurangnya motivasi di antara siswa dan guru, dan pemimpin sekolah yang tidak

kompeten. Dalam tujuan khusus kami, kami ingin meningkatkan kapasitas kepemimpinan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan kebijakan diselenggarakan untuk meningkatkan situasi pembelajaran dan hasil pendidikan yang positif yang menguntungkan siswa dan guru, lebih jauh lagi kami bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif SCEFA dengan Kemendikbud baik di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian untuk mendorong perencanaan pendidikan dan kebijakan yang efektif, oleh karena itu membangun kapasitas SCEFA dan para anggotanya agar dapat secara efektif menjalankan peran dan perjalanan influence ini merupakan intervensi proyek yang utama. (<https://educationoutloud.org>)

Kami menyadari bahwa pekerjaan kami dengan media pada fase sebelumnya sangat penting dan berhasil dalam menyebarkan pesan advokasi kami dan mempengaruhi audiens dan pemerintah, oleh karena itu, pada fase baru ini kami akan lebih memanfaatkan hal tersebut dan mengembangkannya lebih lanjut untuk mengatasi masalah dan mengadvokasi kelompok-kelompok yang termarginalkan dan kurang beruntung melalui kampanye, forum, dan program radio.

Kepemimpinan dan manajemen sekolah merupakan bagian penting dalam proyek ini karena kami akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan 300 kepala sekolah untuk meningkatkan pembelajaran, lingkungan sekolah dan keselamatan siswa serta keterlibatan masyarakat terutama dalam memastikan lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk sekolah. Kami akan bekerja di 10 negara bagian di seluruh wilayah Sudan untuk menjangkau manfaat proyek, misalnya para pemimpin senior, kepala sekolah, guru, PTA, wartawan dan masyarakat.

Negara bagian yang dipilih adalah Khartoum, Gadreif, Kassala, Laut Merah, Sungai Nil, Kordofan Utara, Kordofan Selatan, Darfur Utara, Darfur Selatan, dan Sungai Nil. Ini termasuk setidaknya empat negara pasca konflik untuk mendukung para pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak perang. Karena kami memiliki target yang ambisius, pendekatan strategis kami adalah bekerja melalui para mitra, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk memaksimalkan dampak dan mengurangi beban kerja serta berbagi sumber daya.

Analisis terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan di Sudan mencakup berbagai aspek yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam di negara ini. Pembiayaan pendidikan di Sudan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, melibatkan berbagai sumber dana, baik dari pemerintah, masyarakat, swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Namun, ada sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini.

- 1) Ketergantungan pada Pembiayaan Pemerintah. Kelebihan: Aksesibilitas bagi Masyarakat Miskin: Pembiayaan dari pemerintah memungkinkan pendidikan Islam diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial, terutama mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ini menciptakan peluang untuk memperluas jangkauan pendidikan agama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Subsidi untuk Sekolah dan Madrasah: Pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah dan madrasah untuk mendukung kegiatan pendidikan, seperti gaji pengajar, penyediaan bahan ajar, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Kekurangan: Keterbatasan Dana: Sumber daya finansial yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas, terutama dengan kondisi ekonomi Sudan yang tidak stabil. Hal ini memengaruhi kualitas pendidikan karena banyak lembaga pendidikan Islam yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti fasilitas modern, laboratorium, atau

pelatihan guru yang memadai. Ketergantungan pada Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pendidikan di Sudan sering dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial yang tidak stabil. Ketergantungan pada pembiayaan pemerintah membuat lembaga pendidikan Islam rentan terhadap perubahan kebijakan yang dapat mengurangi alokasi dana untuk pendidikan agama.

- 2) Sumber Pembiayaan Swasta dan Donasi Masyarakat. Kelebihan: Kemandirian Finansial: Lembaga pendidikan Islam di Sudan dapat mengandalkan dana dari sektor swasta atau donasi masyarakat untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pemerintah dan meningkatkan kemandirian finansial. Keterlibatan Masyarakat: Pembiayaan yang berasal dari donasi masyarakat menunjukkan komitmen masyarakat terhadap pendidikan agama. Selain itu, masyarakat juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendidikan. Kekurangan: Ketidakstabilan Sumber Dana: Sumber pembiayaan dari sektor swasta dan masyarakat sering kali bersifat tidak stabil dan bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, sumbangan masyarakat bisa menurun secara signifikan, yang memengaruhi kelangsungan operasional lembaga pendidikan Islam. Ketimpangan Akses Pendidikan: Ketergantungan pada donasi dapat menciptakan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar daerah. Lembaga pendidikan Islam di kota besar dengan donasi lebih besar bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sementara lembaga di daerah terpencil atau miskin mungkin kesulitan untuk berkembang.
- 3) Peran Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan Islam. Kelebihan: Pembiayaan Berkelanjutan: Wakaf merupakan sumber pembiayaan yang relatif stabil dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan Islam yang memiliki wakaf dapat mengandalkan pendapatan dari wakaf untuk mendanai kegiatan operasional mereka, termasuk pembayaran gaji guru dan pengadaan fasilitas. Pemberdayaan Komunitas: Wakaf berperan penting dalam pemberdayaan komunitas, karena mendorong individu dan kelompok untuk berinvestasi dalam pendidikan agama sebagai amal jariyah. Ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung pendidikan Islam. Kekurangan: Pengelolaan Wakaf yang Tidak Optimal: Pengelolaan wakaf yang tidak efisien atau kurang transparan dapat menyebabkan dana wakaf tidak teralokasi dengan baik, mengurangi dampak positifnya dalam pembiayaan pendidikan. Di beberapa kasus, lembaga pendidikan Islam kesulitan dalam memaksimalkan potensi wakaf. Ketergantungan pada Wakaf: Walaupun wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan yang penting, ketergantungan yang berlebihan pada dana ini bisa menimbulkan ketidakstabilan, terutama jika dana wakaf tidak dikelola dengan baik atau jika terdapat krisis ekonomi yang mempengaruhi hasil wakaf.
- 4) Pembiayaan Melalui Beasiswa dan Program Pendanaan Khusus. Kelebihan: Peningkatan Akses Pendidikan: Beasiswa dan program pendanaan khusus memberikan kesempatan bagi siswa yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi Islam, terutama di perguruan tinggi atau universitas Islam. Ini memungkinkan siswa berbakat untuk melanjutkan pendidikan tanpa beban biaya. Keterlibatan Lembaga Internasional: Beasiswa yang dikelola oleh lembaga internasional atau organisasi non-pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan siswa pada standar global dan peluang untuk belajar dari berbagai perspektif. Kekurangan: Beasiswa Terbatas: Beasiswa sering kali terbatas dan tidak mencakup seluruh biaya pendidikan atau hanya diberikan kepada sedikit jumlah siswa. Hal ini membatasi akses bagi siswa yang memerlukan dukungan

finansial untuk pendidikan Islam mereka. Tidak Merata: Pembiayaan pendidikan melalui beasiswa seringkali lebih fokus pada lembaga pendidikan tinggi dan kurang memperhatikan lembaga pendidikan dasar atau madrasah, yang juga memerlukan pendanaan.

- 5) Tantangan Ekonomi dan Politik. Krisis Ekonomi: Sudan mengalami krisis ekonomi yang berlarut-larut, yang berdampak pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mendanai pendidikan. Kenaikan harga barang dan penurunan daya beli mengurangi kemampuan keluarga dan lembaga untuk berinvestasi dalam pendidikan Islam. Instabilitas Politik: Ketegangan politik yang terjadi di Sudan memengaruhi kebijakan pendidikan secara keseluruhan, termasuk pembiayaan pendidikan agama. Perubahan pemerintah atau ketidakstabilan politik sering kali menyebabkan pergeseran dalam kebijakan pembiayaan pendidikan, yang berisiko mengganggu kontinuitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

A. Kesimpulan

Kompleksitas kebijakan Islam di Sudan menunjukkan bagaimana peran agama dapat menjadi kekuatan penyatu, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan dan ketidakstabilan sosial dan politik. Implikasi dari kebijakan ini terhadap stabilitas politik dan kesejahteraan sosial sangat signifikan, dengan ketegangan antara kelompok Muslim dan non-Muslim, tantangan dalam mengelola pluralisme agama, serta dampak ekonomi yang dihadapi oleh negara. Proses transisi Sudan menuju sistem yang lebih inklusif dan adil akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menyeimbangkan peran agama dalam kehidupan politik dengan kebutuhan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai.

Daftar Pustaka

- al-Dawoodi, Raed Sanu Badeed al-Douri Darya Mohammed Aziz. *at-Ta'lim al-Islami fi as-Sudan*. Tikrit: Universitas Tikrit - Fakultas Humaniora Jurusan Sejarah, 2018.
- Buhendwa, Jacaues Kubranz and Kenneth Adam Masungu. "Education Policy in South Sudan: Between the Peace Agreement, the Armed Conflict, the Village and the Camps for the Internally Displaced People," 2018.
- Education Out Loud Advocacy & Social Accountability
<https://educationoutloud.org/project/supporting-development-quality-education-sudan>.
- F.C., Lunenburg. and Ornstein. A.C. *Educational Administration; Concepts and Practices, Third Edition*. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning, 2000.
- Hamid, Monira, et.al. "Demographics of Sudanese University Students in Relation to Regional Development and Conflict." dalam *Submitted to Journal Not Specified*, Version January 7, 2021, www.mdpi.com/journal/notspecified.
- Hasan, Dahlan Hi. "Disintegrasi (Suatu Tinjauan Sosiologis)". dalam *Jurnal Akademia Fisip Untad, Vol. 05, No. 02 Oktober 2013*.
- Hasan, Nur. Perkembangan Islam di Sudan dan Sejarah Bahasa Arab Menjadi Bahasa Resmi Negara. dalam <https://www.harakatuna.com/perkembangan-islam-di-sudan-dan-sejarah-bahasa-arab-menjadi-bahasa-resmi-negara.html>
- Higher Education Admission Committee. *Dalil al-Qabul li Mu'assasat al-Ta'lim al 'Ali Asisten Ahl al-Sudani*. Khartoum: t.tp., 1991.

- Holt, P. M., dan M. W. Daly. *A History of The Sudan From The Coming of Islam to The Present Day*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.
- <https://country-studies.com/sudan/geography.html>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Sudan
- https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Sudan
- https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Sudan
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>
- <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-sudan/>
- <https://www.britannica.com/place/Sudan/Plant-and-animal-life>
- <https://www.britannica.com/place/Sudan/Plant-and-animal-life>
- <https://www.britannica.com/place/Sudan/The-spread-of-Islam>
- <https://www.scholaro.com/db/Countries/sudan/Education-System>
- <https://www-scholaro-com.translate.goog/db/Countries/sudan/Education-System?>
- Huda, Ribut Nur. "Islamic Movement in Sudan: Its' Development and Influence on The Dynamics of Sudan Education." dalam *Jurnal eL-Tarbawi*, Volume 15 No. 1, 2022.
- Joesoef, Daoed. "Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa". dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2011/10/23/15253241/>
- Junaidi, Kholid, et.al. "Analisis Kebijakan Pendidikan di Afrika Utara (Mesir dan Sudan)." dalam *Instructional Development Journal (IDJ)*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2022.
- Khartoum International Institute for Arabic Language. *al-Ta'rif bi al-Ma'had al-Khartoum: al-Majallat al-'Arabiya li al-Dirasat al-'Arabiya*, 1982..
- Khartoum. "Sudanese MPs 'will Protest 2018,'" dalam <https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-mps-will-protest-in-parliament-against-2018-budget>.
- Kubranz, Jacques and Kenneth Adam. "Kebijakan Pendidikan di Sudan Selatan: Antara Perjanjian Damai, Konflik Bersenjata, Desa dan Kamp untuk Pengungsi Internal," 2018.
- Kurniawan, Aucky Adi dan Muhammad Syaprin Zahidi. "Implementasi Demokratisasi Sudan: Kasus Runtuhnya Rezim Pemerintahan Omar Bashir". dalam *Jurnal ICMES Volume 6, Nomor 1, Juni 2022*.
- Kuswana, Dadang. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Maunah, Binti. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Republic of Sudan. Federal Ministry of Education, General Education Sector Strategic Plan 2018/19-2022/23.
- Sari, Aulia Candra. "Pengelolaan Zakat di Negara Sudan". dalam *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 348.
- Sudan: \$20 Million to Support Emergency Education Needs from The Global Partnership for Education dalam <https://www.globalpartnership.org/news/sudan-20-million-support-emergency-education-needs-global-partnership-education>

- Sudan: Building The Foundation for a Strong Education System
<https://www.globalpartnership.org/results/country-journeys/sudan-building-foundation-strong-education-system#>.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Terry, G.R. *Principles of Management* (6th ed). London: Richard D. Irwin Inc, 1977.
- Tilaar, H. A. R. & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- . *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- . *Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Warlizasusi, Jumira, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. Curup: Buku Literasiologi, 2022.